

Kondisi dan Strategi Pertanian Indonesia dalam Memenangkan ACFTA (Asean-China Free Trade Area)

Conditions and Strategies for Indonesian Agriculture in Winning the ACFTA (Asean-China Free Trade Area)

Fatctur Rozci*¹, Ristani Widya Inti²

¹ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

² Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*email: fatchur.rozci.agribis@upnjatim.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 3 Maret 2023

Diterima: 15 April 2023

Diterbitkan: 16 Juni 2023

Abstract

This study intends to determine the condition of import and export, farmers' welfare, and food security in Indonesia in the face of ACFTA and to determine changes in the performance of the Indonesian agricultural sector after the ACFTA phenomenon. The research method used in this research is Literature Review to collect data and information about the state of agriculture in Indonesia, agricultural policies in Indonesia, Indonesia's export and import, and food security in Indonesia at the time the ACFTA was enacted. The results of this study indicate that in the implementation of the ACFTA, the Indonesian agricultural sector showed a decrease in production of 0.87% which resulted in a decrease in GDP of 0.22%. In addition, there is a possibility that Indonesia will become dependent on other countries' agricultural commodities, which could threaten the country's food security. Therefore, Indonesia has implemented several policies and strategies to overcome this, such as setting government purchasing prices and highest retail prices, developing food diversification, government agency supervision of local agricultural commodities, labeling, assessment and national standardization of local agricultural commodities. to provide incentives to farmers.

Keywords :

ACFTA, Agricultural Performance, Export Import, Food Security, Agricultural Policy

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui keadaan ekspor impor, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan di Indonesia dalam menghadapi ACFTA serta untuk mengetahui perubahan kinerja sektor pertanian Indonesia setelah adanya fenomena ACFTA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Literature Review untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan pertanian di Indonesia, kebijakan pertanian di Indonesia, ekspor impor Indonesia, serta ketahanan pangan di Indonesia pada saat diberlakukannya ACFTA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pada penerapan ACFTA, sektor pertanian indonesia menunjukkan penurunan produksi sebesar 0,87% yang mengakibatkan penurunan PDB sebesar 0,22%. Disamping itu, terdapat kemungkinan Indonesia mengalami ketergantungan terhadap komoditas pertanian negara lain sehingga dapat mengancam ketahanan pangan negara. Oleh karena itu, Indonesia telah menerapkan

beberapa kebijakan dan strategi untuk mengatasi hal tersebut, seperti penetapan harga pembelian pemerintah dan harga eceran tertinggi, pengembangan diversifikasi pangan, pengawasan lembaga pemerintah terhadap komoditas pertanian lokal, pelabelan, penilaian, dan standarisasi nasional terhadap komoditas pertanian lokal, hingga memberikan intensif kepada petani.

Kata Kunci:

ACFTA, Kinerja Pertanian, Ekspor Impor, Ketahanan Pangan, Kebijakan Pertanian

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional dewasa ini telah mencapai tahap penerapan perdagangan bebas antar Negara. Perdagangan bebas sendiri adalah perdagangan antar dua Negara atau lebih yang dilakukan dengan menghapuskan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional tersebut sehingga pemenuhan kebutuhan barang atau jasa antar Negara dapat dipenuhi secara lebih mudah. Para ahli menyebutkan bahwa perdagangan internasional akan lebih baik jika campur tangan pemerintah dapat dilakukan seminimal mungkin terutama pada kebijakan-kebijakan yang dapat mempersulit perdagangan antar Negara. Negara meminimalkan hambatan-hambatan tersebut akan dalam perdagangan internasional mendapatkan manfaat yang lebih besar tidak hanya bagi Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, tetapi juga Negara-negara lainnya (Fahreza, 2018).

Keuntungan yang didapatkan adalah setiap Negara yang terlibat dalam perdagangan bebas seperti teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam (Fahreza, 2018) adalah Negara dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh negara (kurang efisien secara absolut) tersebut dengan melakukan impor barang atau jasa dan Negara yang memiliki kelebihan (memiliki keunggulan absolut) atas produksi barang atau jasa tersebut dapat melakukan kegiatan ekspor. Hal ini yang menjadi latar belakang adanya liberalisasi perdagangan internasional.

Fakta menyebutkan bahwa perkembangan teori tersebut ternyata dapat membawa dampak yang negatif dengan timbulnya persaingan pasar yang tidak sehat. Tekanan pasar internasional menjadikan persaingan yang ketat berbagai produk yang beredar di pasar bebas. Produk yang lebih unggul dan lebih terkenal akan dengan mudah menguasai pasar sehingga dapat menyudutkan produk-produk yang kurang terkenal yang biasanya diproduksi oleh usaha-usaha berskala kecil atau industri rumahan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Negara yang terlibat dalam perdagangan bebas dengan melakukan strategi dan upaya sehingga dapat bersaing di pasar internasional.

Salah satu bentuk kerjasama perdagangan bebas adalah ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) yang dimulai sejak tahun 2010 dengan 6 negara ASEAN yaitu, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dan secara penuh diikuti oleh Negara ASEAN di tahun 2015 (Somjai, 2016). ACFTA merupakan kerja sama antara Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dengan Negara Cina yang berfokus pada perdagangan bebas antara Negara-negara yang terlibat dengan menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam perdagangan bebas baik tariff maupun non-tariff, serta upaya perluasan pasar, pelayanan investasi, dan adanya peningkatan kerjasama ekonomi Negara-negara ASEAN dan Cina (Ridwan, 2020).

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam memenuhi kebutuhan umat manusia. Sektor pertanian menjadi salah satu penopang dengan kontribusi yang besar dalam pembangunan perekonomian sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan pemebuhan

kebutuhan sektor lainnya terutama pemenuhan kebutuhan bahan baku. Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki resiko dan keuntungan yang besar dalam perdagangan termasuk dalam perdagangan antar negara (perdagangan internasional). Bergabungnya Cina dalam kawasan perdagangan bebas Negara-negara ASEAN memberikan peluang dan tantangan baru bagi negara-negara yang tergabung dalam ACFTA. Dalam kerjasama ACFTA, antara Cina dengan Negara ASEAN sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan dan memiliki produk yang beragam sehingga, selain meningkatkan volume pasar juga dapat memunculkan persaingan yang ketat diantara kedua belah pihak. Cina unggul dalam jumlah produksi berbagai jenis komoditas pertanian yang mendominasi perdagangan dunia. Hal ini dapat menimbulkan pengaruh positif hanya pada Negara maju saja dan Negara berkembang justru mendapatkan pengaruh yang cenderung negatif. Terlebih adanya indikasi bahwa pasar tunggal ASEAN masih belum optimal dalam melakukan peningkatan perdagangan intra-ASEAN yang dikhawatirkan akan sama dengan keadaan di EL Salvador yang belum mampu menstimulasi kinerja sektor pertanian akibat adanya liberalisasi dengan Negara-negara di kawasan sekitarnya (Nasrudin et al., 2015).

Indonesia sebagai Negara yang memiliki peluang pengembangan perdagangan internasional terhadap komoditas pertanian yang besar harus siap dan mampu bersaing dengan Negara Cina serta Negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN dalam perdagangan bebas dampak dari adanya kerjasama ACFTA sehingga sektor pertanian dapat berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan yakni pembangunan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang berjalan mengiringi kemajuan zaman. Hal ini merupakan topic yang menarik untuk menjadi bahan analisis bagaimana sikap dan dampak adanya kerjasama ACFTA terhadap sektor pertanian di Indonesia yang dilihat melalui keadaan sektor pertanian setelah adanya kerjasama ACFTA serta strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam perdagangan bebas sektor pertanian setelah adanya kerjasama ACFTA. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini diantaranya (1) untuk mengetahui keadaan ekspor impor, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Indonesia dalam menghadapi ACFTA dan (2) untuk mengetahui perubahan kinerja sektor pertanian Indonesia setelah adanya fenomena ACFTA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan *Literature Review* atau tinjauan Pustaka. Studi literature review adalah cara penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang biasa dipakai dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, internet, dan Pustaka lain. Setelah melakukan literature review, peneliti akan menganalisis dan merangkum, serta melakukan sintesis secara kritis dan mendalam berdasarkan beberapa paper yang diriview atau ditinjau. Hasil dari rangkuman, analisis dan sintesis tersebut akan ditulis secara deskriptif dalam bentuk artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Kinerja Sektor Pertanian Indonesia Pada Saat dan Sebelum di Berlakukan Kebijakan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*).

Berdasarkan pola dan struktur perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan China, Indonesia sangat bergantung pada ekspor-impor komoditas pertanian, perkebunan, dan

pertambangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Latif A. & Siwage D. (2010), yang menyatakan bahwa dalam pola struktur perdagangan antara Indonesia dan China, diperkirakan bahwa Indonesia akan sangat bergantung pada ekspor komoditas primer, seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Pemberlakuan ACFTA pada seluruh sector akan berpengaruh terhadap arus perdagangan pertanian antar negara, karena terkait dengan permintaan input (komoditas pertanian) serta perubahan pendapatan.

Nasrudin (2015) menunjukkan bahwa kinerja sector pertanian pada saat periode sebelum ACFTA (1996-2004) berdaya saing lemah di pasar internasional khususnya di pasar China, karena jumlah subsector pertanian Indonesia kurang dari 50% dan China selalu berdaya saing lebih tinggi daripada Indonesia. Sebelum pemberlakuan ACFTA, Indonesia lebih cenderung sebagai negara eksportir pada subsector *fish, crustaceans, dan mollusca*.

Pemberlakuan perjanjian ACFTA dimulai pada tahun 2004 dengan skema EHP yang mencakup berbagai sector pertanian. Nilai perdagangan pertanian Indonesia-ASEAN meningkat seiring pemberlakuan ACFTA. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasrudin et al., 2015), yang menyatakan bahwa peningkatan ekspor Indonesia lebih rendah dibanding dengan peningkatan impor, sehingga neraca perdagangan Indonesia deficit dari ASEAN, sejak awal ACFTA diberlakukan. Secara umum komoditas pangan perkebunan menjadi surplus utama dalam perdagangan komoditas pangan.

Strategi Pertanian Indonesia dalam Menghadapi ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area)

Istilah liberalisasi perdagangan menjadi salah satu isu ekonomi yang kini menjadi suatu kenyataan yang mengarahkan pada perdagangan bebas atau yang lebih dikenal dengan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Center). ACFTA ini didirikan guna meningkatkan daya saing ekonomi negara ASEAN sebagai produksi komoditas dunia. Menurut (Adisa, 2021) Kemajuan China dalam bidang ekonomi ini menyebabkan posisinya eksistensinya diperhitungkan dalam hubungan internasional dan mitra dagang dunia hingga organisasi organisasi Internasional. Negara Cina juga menjadi salah satu mitra dagang penting negara Indonesia. Hal ini berawal pada tahun 1949 ketika negara Indonesia pertama kali berdiri mulai menjalin hubungan ekonomi berupa perjanjian perdagangan pada tahun 1953 hingga pada saat ini.

Tabel 1. Distribusi Marjin, Share dan rasio keuntungan dari pemasaran beras ketan di Surabaya

No	Kelompok Komoditas	NILAI ISP				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Buah dan Kacang	-0,15	-0,24	-0,14	-0,17	-0,03
2	Produk Sayuran	0,81	0,85	0,85	0,83	0,74
3	Gula	-0,63	-0,55	-0,68	-0,58	-0,77
4	Kopi dan Teh	0,84	0,92	0,93	0,92	0,95
5	Daging	-0,4	-0,34	-0,35	-0,61	-0,74
6	Tepung	-0,8	-0,74	-0,79	-0,36	-0,3

Sumber: (Departemen Perindustrian, 2008)

Menurut (Scott et al., 2014) pada sektor pertanian sendiri, sejak tahun 2001 negara China memiliki sepuluh partner negara yang secara berkala selalu melakukan perdagangan di sektor pertanian dengan China baik ekspor maupun impor. Negara negara tersebut terdiri dari Amerika Serikat, Brazil, Jepang, Thailand, Australia, Indonesia, Kanada, Malaysia, Rusia, dan Hongkong. Dengan adanya kerjasama tersebut ekspor produk pertanian negara China selalu meningkat setiap tahunnya sejak 2001 hingga 2012, namun pemberlakuan kawasan perdagangan ACFTA menyebabkan impor negara Indonesia atas berbagai produk pertanian meningkat tajam. Sebagai contohnya pada komoditas singkong yang diolah menjadi tepung

tapioka, Indonesia merupakan negara pengekspor tepung tapioka terbesar kedua setelah Thailand namun dalam perdagangan regional ASEAN Indonesia banyak mengimpor pati umbi kayu atau tepung tapioka dari negara Thailand. Hal ini dapat dilihat pada data Indeks Spesialis Perdagangan beberapa Komoditas Pertanian Indonesia pada tahun 2001 – 2005:

Menurut (Eka & Haryadi, 2008) adanya pemberlakuan kebijakan ACFTA mendorong pergeseran investor di bidang pertanian menuju investor di bidang industri, sehingga dampak yang di timbulkan adalah produk impor ACFTA masuk kepasar domestik pada komoditas pertanian dan menurunkan tarif pada komoditas pertanian. Terdapat faktor lain yang diduga menjadikan negara Indonesia belum mampu memanfaatkan kebijakan ACFTA yaitu tantangan tekanan kompetisi pasar domestik belum mampu merespon peluang dan rendahnya tingkat produktivitas akibat masalah teknologi dibidang pertanian.

ACFTA juga berdampak pada PDB sektor pertanian di negara Indonesia. Produk Domestik Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Menurut (Nasrudin et al., 2015) PDB dalam sektor pertanian diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,22% karena pemberlakuan kebijakan ACFTA secara penuh. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor penurunan minat petani muda terhadap sektor pertanian, penurunan nilai investasi sektor pertanian, dan rendahnya mutu pendidikan yang ada di negara Indonesia.

Kekuatan negara Indonesia untuk perkembangan perekonomian dapat meningkat dengan didukung adanya agrosistem dan sumber daya alam yang lebih dari cukup. Kontinuitas produk pertanian yang dihasilkan oleh Indonesia memberikan kesempatan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan guna mendukung perekonomian negara Indonesia. Langkah yang tepat bagi negara Indonesia saat memasuki pasar perdagangan bebas ialah mempersiapkan komoditas permintaan pasar dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Menurut (Iqbal et al., 2020) Negara Indonesia harus mereformasi sistem komoditas pertanian dengan cara kepemilikan produk pertanian yang dikelola oleh perusahaan dengan manajemen yang sudah terarah guna memonitoring pasar perdagangan bebas. Pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan perlu memperhatikan perkembangan produk pertanian dan harga pangan dunia, mengingat pengaruh fluktuasi harga pangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Agar strategi ACFTA berpengaruh positif terhadap Indonesia maka diperlukan strategi berupa pemerintah Indonesia memberikan modal belanja yang besar untuk produktivitas di bidang pertanian, regulasi tata niaga dan penghapusan sistem pungut liar serta melakukan gerakan pembinaan mengenai kegiatan pemasaran produk – produk pertanian hingga branding produk pertanian sehingga produk – produk pertanian mampu bersaing di pasar bebas dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Menurut (Saragih, 1998) strategi kebijakan yang menyangkut aspek teknis dan makro dan mikro pertanian mutlak harus dilakukan guna meningkatkan daya saing, pembangunan ekonomi pertanian harus didasari pola agribisnis mulai subsistem hulu – hilir, pembangunan pertanian berdasarkan strategi agropolitan sehingga para tengkulak tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar guna memasarkan produk pertanian.

Kebijakan Sektor Ekspor – Impor Pertanian di Indonesia Pada Saat di Berlakukan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*)

Pentingnya sektor pertanian bagi umat manusia menjadikan suatu pembangunan yang berkelanjutan yakni pembangunan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang berjalan mengiringi kemajuan zaman. Salah satu cara yang dilakukan dalam peningkatan

pembangunan pertanian adalah dengan memberikan kesempatan dan wadah seluas-luasnya bagi sektor pertanian sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Masuknya produk pertanian dalam pasar internasional merupakan salah satu bukti dari terbukanya kesempatan bagi sector pertanian dalam peningkatan pembangunan pertanian. Perdagangan internasional menjadi wadah yang menguntungkan bagi pelaku ekonomi dalam rangka memperluas pasar penjualan produk serta memperkuat pengaruh dan penguasaan di pasar untuk mencapai laba sebesar-besarnya. Namun, perdagangan bebas juga memiliki dampak yang negatif bagi produk pertanian Indonesia dengan peningkatan persaingan dengan produk pertanian yang masuk ke Indonesia.

Indonesia dalam menghadapi adanya dampak kerjasama ACFTA guna melindungi produk pertanian Indonesia terutama dalam menghadapi persaingan produk pertanian dari Cina melakukan pertemuan komisi bersama Indonesia dan Cina yaitu Joint Commision Meeting/JCM ke-10.117 pada tanggal 3 April 2010 di Yogyakarta. Dari pertemuan tersebut ditandatangani persetujuan yakni Agreed Minutes of The Meeting for Further Strenghtening Economic and Trade Cooperation untuk menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak ACFTA (Putra, 2015). Maka dari itu, dihasilkan beberapa kesepakatan yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2010) diantaranya :

1. Kesepakatan mengenai Cina yang memberikan fasilitas akses pasar bagi beberapa komoditas buah-buahan diantaranya adalah pisang, nanas, dan rambutan serta komoditas sarang burung walet Indonesia untuk dapat masuk ke pasar Cina.
2. Kesepakatan pembentukan Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan (Working Group on Trade Resolution/WGTR) yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas perdagangan sehingga perdagangan antar kedua Negara menjadi lancar serta melakukan pembukaan cabang Bank Mandiri di Cina dalam rangka mencapai tujuan tersebut.
3. Penyelesaian perjanjian perluasan dan pencalamen kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan (Agreement Deepending Bilateral Economic Cooperation).

Indonesia dalam melindungi produk pertanian Indonesia juga melakukan beberapa langkah yaitu, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) berupaya dengan mendorong sektor pertanian sebagai sektor prioritas dalam gerakan nasional penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) (Badan Standardisasi Nasional, 2012); melakukan pengawasan terhadap barang impor seperti penyelidikan antidumping dan subsidi terhadap impor yang dapat merugikan Indonesia; membuat pengawasan penggunaan surat keterangan asal (SKA) dengan Negara mitra; menggunakan produk dalam negeri dengan program Aku Cinta Indonesia (ACI); serta menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Putra, 2015).

Pada produk hortikultura, pemerintah membuat pengaturan mengenai pemasukan ke dan pengeluaran daerah pabean Indonesia sebagaimana terdapat dalam UU No.13 tahun 2010 tentang Hortikultura, produk hortikultura dapat diimpor setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian. Pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan ekspor-impor melalui kementerian perdagangan dengan dikelurakannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor porduk hortikultura yang mengatur tata cara impor produk hortikultura berdasarkan beberapa hal termasuk didalamnya perlindungan konsumen (Putra, 2015).

Kebijakan Sektor Ketahanan Pangan Indonesia Pada Saat di Berlakukannya ACFTA

Sebagai negara yang memiliki penduduk sebesar 273 juta, Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar dalam menyejahterakan penduduknya. Salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan menerapkan kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya terkait dengan kebutuhan bahan makanan yang berkualitas, aman, dan akses yang mudah. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai berikut: "Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". Di Indonesia sendiri, Tolak ukur ketahanan pangan di Indonesia adalah ketersediaan kebutuhan beras dalam rumah tangga sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia (Sriyanto, 2010).

Orientasi Ketahanan Pangan selalu dikaitkan dengan ketersediaan pangan yang berkualitas, keamanan pangan, pendistribusian pangan yang merata, dan kemandirian pangan sebagai konsepsi baru dalam pengertian ketahanan pangan (Sriyanto, 2010). Namun, Untuk mengimplementasikan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang kuat dan berkelanjutan, diperlukannya kebijakan pemerintah yang dapat menghadapi permasalahan sektor pangan (Jamaludin, 2022). Hal ini dikarenakan terjadinya perjanjian pasar bebas terutama ACFTA yang dapat mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia. Sejak ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2010, ACFTA sudah menerapkan zero tariff secara efektif pada 6682 point tarif dalam 17 sektor, termasuk 12 sektor manufaktur dan 5 sektor pertanian, pertambangan dan kelautan. Kebebasan tarif ini dapat berpengaruh negatif bagi produk dan komoditas pertanian lokal sehingga dapat mengancam ketahanan pangan Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kemampuan komoditas lokal dalam persaingan bebas serta keberlanjutan impor yang terjadi saat ini. Disamping itu, Dengan adanya perdagangan bebas ACFTA akan menimbulkan beragamnya komoditas pangan impor yang masuk ke Indonesia sehingga akan mengakibatkan semakin besarnya kemungkinan tersebarnya hama dan penyakit baru yang dapat mengancam varietas keragaman hayati dan produktivitas pertanian Indonesia. Hal ini dapat menurunkan produktivitas pangan lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman menunjukkan bahwasanya produksi pangan lokal mengalami penurunan sebesar 0,87% setelah diberlakukannya ACFTA yang diakibatkan oleh besaran impor yang masuk di pasar lokal terutama komoditas sereal dan hortikultura. Selain itu, dengan adanya ACFTA, mengakibatkan peningkatan ekspor impor komoditas pangan dengan kecenderungan peningkatan impor yang lebih tinggi (Rahman et al., 2022) sehingga dapat menimbulkan ketergantungan pada negara lain. Jika suatu negara mengalami ketergantungan produk dari negara lain, akan mengakibatkan penurunan konsumsi produk lokal yang akan mengancam ketahanan pangan suatu negara jika produk tersebut merupakan produk pertanian.

Dengan adanya ancaman tersebut pemerintah diharapkan memiliki strategi untuk menghadapi ACFTA. Pemerintah sendiri, memiliki empat strategi dalam menjaga ketahanan pangan negara, yaitu penetapan harga pembelian pemerintah dan harga eceran tertinggi yang diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan jaminan kepada petani terhadap harga beras sebagai makanan pokok masyarakat sehingga dapat meningkatkan produksi beras lokal.

Selanjutnya yaitu pengembangan diversifikasi pangan berbasis tanaman pangan lokal dengan penggunaan teknologi pangan yang tepat. Strategi ketiga yaitu pengawasan terhadap transaksi dan aktivitas pertanian komoditas beras dalam negeri oleh bulog sebagai lembaga resmi pemerintah. Strategi terakhir yaitu penegakan tentang manfaat diversifikasi pangan dalam menghadapi ACFTA dan perubahan iklim (Sriyanto, 2010). Disamping itu, Melalui Peraturan Menteri Pertanian No.88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan menggantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 telah ditetapkan ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan. Dengan adanya pembatasan volume impor produk hortikultura diharapkan industri agribisnis Indonesia bisa terus berkembang pesat dan menghasilkan produk lokal yang mampu bersaing dipasar nasional maupun internasional (Putra, 2015). Selain itu, dalam menjaga komoditas pangan akibat hama ataupun penyakit yang dibawa oleh komoditas impor, Indonesia dapat mereduksi dampak dari perdagangan bebas ASEAN yaitu : (1) *sanitary dan phytosanitary*, (2) *codex for alimentation*, (3) komoditas sangat sensitif, dan (4) pangan segar halal (Patros & Azilfan, 2016).

KESIMPULAN

Pola struktur perdagangan antara Indonesia dengan China diprediksi bahwa negara Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan ACFTA pada seluruh sektor maka akan berpengaruh pada arus perdagangan di sektor pertanian antar negara. Sebelum adanya pemberlakuan kebijakan ACFTA kinerja pertanian Indonesia memiliki daya saing lemah di pasar internasional khususnya China hal ini menjadikan negara Indonesia lebih cenderung sebagai negara eksportir pada sub sektor fish, crustacean, dan mollusc.

Kebijakan ACFTA juga berdampak pada PDB sektor pertanian di negara Indonesia hal ini dibuktikan dengan penurunan PDB Sektor pertanian sebesar 0,22% sehingga diperlukan strategi pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan adanya kebijakan ACFTA agar sektor pertanian mampu menjadi penopang utama. Adapun beberapa strategi yang harus dilakukan seperti meningkatkan daya dukung dengan menerapkan agrosistem dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, mempersiapkan komoditas pertanian mulai dari hulu hingga hilir, memperhatikan perkembangan produk pertanian dan harga pangan , memberikan modal belanja yang besar untuk produktivitas pertanian serta pemberlakuan regulasi tata niaga pertanian dan penghapusan sistem pungut liar.

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam mensejahterakan masyarakatnya, salah satu upaya yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan ketahanan pangan. Tolak ukur dari ketahanan pangan yang ada di negara Indonesia adalah ketersediaan kebutuhan beras dalam rumah tangga sebagai bahan makan pokok. Dalam mengimplementasikan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan diperlukan beberapa kebijakan pemerintah hal ini dikarenakan adanya perjanjian pasar bebas (ACFTA) yang akan mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia. Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia seperti penetapan harga pembelian dan harga eceran tertinggi, pengembangan diversifikasi pangan berbasis tanaman pangan lokal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengawasan terhadap transaksi dan

aktivitas pertanian komoditas beras dalam negeri oleh bulog sebagai lembaga resmi pemerintah, dan penegakan tentang manfaat diversifikasi pangan dalam menghadapi ACFTA.

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan kesimpulan diatas sebagai hasil tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan saran untuk bahan pertimbangan lebih lanjut yaitu pemerintah sebaiknya memberikan perhatian khusus guna merevitalisasi wilayah sentra sentra produksi produk pertanian yang unggul dengan cara memberikan pendampingan dalam kegiatan pertanian mulai dari hulu hingga hilir dan pemerintah harus berupaya untuk mengurangi dan membatasi impor produk pertanian karena telah menekan dan membatasi pangsa pasar produk pertanian dalam negeri. Selagi petani Indonesia masih mampu untuk memproduksi dan memenuhi permintaan pasar sebaiknya pemerintah mendukung langkah tersebut untuk menciptakan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisa, S. (2021). *Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Regulasi Teknis Tiongkok (Sps Measures) Pada Ekspor Produk Buah-Buahan Tropis*.
- Eka, R. O., & Haryadi, P. (2008). *Impacts of ASEAN Agricultural Trade Liberalization on ASEAN-6 Economies and Income Distribution in Indonesia The Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT) aims at building regional trade policy and facilitation research capacity in developing countries. In Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series (Issue 51)*. www.artnetontrade.org.
- Fahreza, M. (2018). Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Internasional Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia. *In Jurnal Ilmiah Pena (Vol. 1)*.
- Iqbal, A., Zhang, X., Tauni, M. Z., & Jebran, K. (2020). Principal-principal agency conflicts, product market competition and corporate payout policy in China. *Journal of Asia Business Studies*, 14(3), 265–279. <https://doi.org/10.1108/JABS-02-2018-0038>
- Jamaludin, M. (2022). Indonesia's Food Security Challenges: How Food SOE Optimizes its Role? *In Research Horizon (Vol. 2, Issue 3)*.
- Nasrudin, N., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Walujadi, D. (2015). The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) on Indonesia's Economic Performance and Agriculture Sector. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 9(1), 1–24.
- Patros, A., & Azilfan, Y. (2016). Pengaruh Implementasi Aturan Karantina Terhadap Perdagangan Produk Pertanian Antar Negara di Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(1), 56–72., 1(1), 56–72.
- Putra, A. K. (2015). Tinjauan Yuridis Agreement on a Agriculture Dalam Kerangka ASEAN-China Free Trade Area Terhadap Kebijakan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 30–44.
- Rahman, A. B., Iwang, B., Taqiya, A., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., & Alauddin, U. (2022). *Analisis implementasi CAFTA terhadap komoditas tekstil di Indonesia*. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11749>
- Ridwan, M. (2020). The Determinant Effect of ACFTA on Palm Oil Trade Between China and Indonesia. *Journal of Culture, Society and Development*, 58, 38–50. <https://doi.org/10.7176/jcsd/58-04>
- Saragih, B. (1998). *Agribisnis paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian*.
- Scott, R. R., Bugang, W., & Riedel, M. (2014). *This Report Contains Assessments Of Commodity And Trade Issues Made By Usda Staff And Not Necessarily Statements Of Official U.S. Government Policy-Date: GAIN Report Number: China's 2013 Agricultural Trade Report China-Peoples Republic of*.

- Somjai, M. K. (2016). *ASEAN-CHINA ECONOMIC COOPERATION UNDER THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA): THE CASE STUDY OF THAILAND*.
- Sriyanto, A. N. P. (2010). *Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional Menghadapi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.